

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs), merupakan tujuan global yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai seruan universal untuk bertindak mengakhiri kemiskinan, melindungi semua makhluk yang membuat planet layak untuk ditempati dan memastikan bahwa pada tahun 2030 semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran.<sup>1</sup> Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi oleh semua negara anggota PBB memberikan *Blueprint* bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi seluruh manusia sekarang dan di masa depan.<sup>2</sup> SDGs mempunyai 17 tujuan dengan 169 target yang telah disetujui oleh semua negara anggota PBB untuk dicapai pada tahun 2030.<sup>3</sup> Salah satu tujuan SDGs yaitu tujuan kesetaraan gender yang tercantum pada tujuan lima.

Kesetaraan gender merupakan proses bersikap adil terhadap perempuan dan laki-laki, dengan tujuan keseluruhan dari kesetaraan gender yaitu di mana perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan, hak dan kewajiban yang sama di berbagai bidang.<sup>4</sup> Kesetaraan gender merupakan bagian yang penting dari

---

<sup>1</sup> UNDP, "What Are the Sustainable Development Goals?," *United Nations Development Programme*, diakses pada 15 April 2022, <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>.

<sup>2</sup> United Nations, "History," *Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development*, n.d., diakses pada 15 April 2022, <https://sdgs.un.org/goals>.

<sup>3</sup> UNDP.

<sup>4</sup> UNFPA, "Frequently Asked Questions about Gender Equality," *United Nations Population Fund*, n.d., diakses pada 17 April 2022. <https://www.unfpa.org/resources/frequently-asked-questions-about-gender-equality>.

semua dimensi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.<sup>5</sup> Kesetaraan gender membutuhkan realisasi semua hak asasi manusia, misalnya hak atas pangan, air dan sanitasi, penghidupan serta integritas dan keamanan tubuh.

Perempuan merupakan setengah dari sumber daya manusia dunia yang paling kurang dimanfaatkan. Perempuan paling menderita dari guncangan dan tekanan lingkungan, iklim dan ekonomi, yang merusak peran penting mereka dalam menopang keluarga dan komunitas mereka.<sup>6</sup> Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat nasional dan global bergantung pada perempuan yang bergabung dalam angkatan kerja.<sup>7</sup> Jika memanfaatkan sumber daya perempuan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan akan menurun, kinerja dan inovasi bisnis akan ditingkatkan.<sup>8</sup> Oleh karena itu, memberdayakan perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender penting dilakukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Dalam tujuan lima SDGs yaitu kesetaraan gender, ada delapan target dan 12 indikator. Salah satunya yaitu target 5.2 yaitu penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.<sup>9</sup> Penghapusan kekerasan berbasis gender merupakan prioritas, dan merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia paling luas di dunia saat ini.<sup>10</sup> Berdasarkan data dari 87 negara, 1

---

<sup>5</sup> UN Women, “SDG 5: Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls,” n.d., diakses pada 15 April 2022, <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality>.

<sup>6</sup> Preetha Prabhakaran Melissa Leach, Lyla Mehta, “Gender Equality and Sustainable Development: A Pathways Approach,” *Un Women*, No. 13 (2016): 11.

<sup>7</sup> OECD, “Maximizing The Economic, Social and Environmental Role of Women,” 2018, 11, file:///D:/Documents/Downloads/40881538.pdf.

<sup>8</sup> OECD.

<sup>9</sup> United Nations, “SDG Indicators,” n.d., diakses pada 15 April 2022 <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=5>.

<sup>10</sup> UN Women.

dari 5 perempuan dan anak perempuan di bawah usia 50 tahun mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan intim dalam 12 bulan terakhir, serta adanya praktik-praktik berbahaya seperti, pernikahan anak yang telah mencuri masa kanak-kanak 15 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun setiap tahunnya.<sup>11</sup>

Menurut Laporan Kesenjangan Gender Global telah ada kemajuan dalam mengatasi kesenjangan gender. Eropa Barat merupakan wilayah terbaik dalam mengatasi kesenjangan gender dengan skor rata-rata 76,7%, Amerika Utara mencapai 72,9%, Amerika Latin dan Karibia mencapai 72,1%, Eropa Timur dan Asia Tengah mencapai 71,5%, Asia Timur dan Pasifik mencapai 68,5%, Afrika Sub-Sahara mencapai 68,0%, Asia Selatan mencapai 66,1%, Timur Tengah dan Afrika Utara merupakan wilayah dengan tingkat kinerja terendah yang mencapai 61,1%.<sup>12</sup> Dalam mengatasi kesenjangan gender di wilayah Asia Selatan Bangladesh berada di peringkat 1, dan disusul oleh Nepal, Sri Lanka, India, Maldives, Bhutan dan Pakistan.<sup>13</sup>

Bangladesh telah mengintegrasikan tujuan dan target global ke dalam rencana lima tahun nasionalnya yang disebut dengan Rencana Lima Tahun Ke-7 Bangladesh (2016-2020). Rencana Lima Tahun Ke-7 sebagai dokumen panduan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun, semua 17 tujuan telah diintegrasikan ke dalam rencana tersebut.<sup>14</sup> Visi pada tujuan kesetaraan gender dari Rencana

---

<sup>11</sup> UN Women.

<sup>12</sup> World Economic Forum, *Global Gender Gap Report 2020: Insight Report*, 2019, 24, diakses pada 30 April 2022, [http://www3.weforum.org/docs/WEF\\_GGGR\\_2020.pdf](http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf).

<sup>13</sup> World Economic Forum.

<sup>14</sup> General Economics Division, "Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2018," *United Nations Department of Economic and Social Affairs*, 2018.

Lima Tahun ke-7 adalah mewujudkan sebuah negara di mana laki-laki dan perempuan akan memiliki kesempatan dan hak yang sama dan perempuan akan diakui sebagai kontributor yang setara dalam pembangunan ekonomi, sosial dan politik.<sup>15</sup>

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi masalah sosial, budaya dan ekonomi yang serius di Bangladesh, di mana hampir dua dari tiga perempuan telah mengalami kekerasan berbasis gender selama hidup mereka.<sup>16</sup> Pemerintah Bangladesh telah merevisi undang-undang yang ada dan mengadopsi strategi baru untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Pasal 10, 27, 28 dan 29 Konstitusi Bangladesh memastikan kesetaraan kesempatan bagi semua warga negara, Pasal 34 Konstitusi yang diadopsi pada tahun 1972 dan diubah pada tahun 2014 melarang segala bentuk kerja paksa, Pasal 35 Konstitusi yang diadopsi pada tahun 1972 dan diubah pada tahun 2014 melarang penyiksaan dan kekejaman.<sup>17</sup> Namun kekerasan terhadap perempuan tetap terjadi di Bangladesh walaupun pemerintah sudah merevisi undang-undang baru.

**Tabel 1.1 Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan di Bangladesh Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah
2016	1.274
2017	1.324
2018	956
2019	1.393
2020	1.927

Sumber: Laporan Ordhikar

<sup>15</sup> SDGF, "Addressing Violence against Women in Bangladesh," 2014, diakses pada 30 April 2022, <https://www.sdgfund.org/case-study/addressing-violence-against-women-bangladesh>.

<sup>16</sup> SDGF.

<sup>17</sup> Fardaus Ara, "Violence against Women in Bangladesh: An Overview," *Journal of Public Administration* 2, No. 1 (2020): 24–30.

Pada tahun 2018 data pelaporan sebanyak 956, namun pada kenyataannya jumlah kekerasan yang terjadi jauh lebih tinggi. Perempuan tidak melaporkan kejahatan kekerasan termasuk pemerkosaan kepada polisi, karena tidak dianggap serius oleh polisi dan polisi tidak mencatat kejahatan tersebut.<sup>18</sup> Pada tahun 2019 dan 2020 jumlah kekerasan meningkat drastis, akibat dari *lockdown* dan kesulitan keuangan selama pandemi Covid-19 yang telah menempatkan perempuan pada resiko perilaku kekerasan.<sup>19</sup> Bangladesh telah menjadi negara dengan peringkat tertinggi di Asia Selatan dan peringkat teratas keempat secara global dalam kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan intim, 50% wanita berusia antara 15-49 tahun telah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangan selama hidup mereka.<sup>20</sup>

Selama beberapa tahun terakhir, Bangladesh telah membuat kemajuan yang signifikan dan menduduki peringkat ke-50 dari 153 negara pada tahun 2019 dalam Indeks Kesenjangan Gender Global, dihitung dengan menggunakan pencapaian pendidikan, kesehatan dan kelangsungan hidup, partisipasi ekonomi, dan pemberdayaan politik.<sup>21</sup> Negara-negara dengan kesetaraan yang lebih tinggi antara perempuan dan laki-laki cenderung memiliki tingkat kekerasan terhadap perempuan yang lebih rendah.<sup>22</sup> Oleh sebab itu, semestinya tingkat kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh menurun, karena adanya peningkatan kesetaraan gender yang signifikan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti

---

<sup>18</sup> DFAT, "Country Information Report Bangladesh," February 2019, 34.

<sup>19</sup> Md Jamal Hossain and Md Rabiul Islam, "Increments of Gender-Based Violence amid COVID-19 in Bangladesh: A Threat to Global Public Health and Women's Health," *International Journal of Health Planning and Management* 36, No. 6 (2021): 2, <https://doi.org/10.1002/hpm.3284>.

<sup>20</sup> Ntasha Bhardwaj and Jody Miller, "Comparative Cross-National Analyses of Domestic Violence: Insights from South Asia," *Feminist Criminology* 16, No. 3 (2021): 3.

<sup>21</sup> Ntasha Bhardwaj and Jody Miller.

<sup>22</sup> UNIFEM, "Investing in Gender Equality: Ending Violence against Women and Girls," 2011,3.

tantangan pemerintah Bangladesh dalam mencapai SDGs, khususnya pada tujuan lima target 5.2.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bangladesh telah melakukan beberapa revisi undang-undang untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Namun Bangladesh menempati peringkat tertinggi keempat dalam kekerasan pasangan intim. Padahal kesetaraan gender di Bangladesh sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana Bangladesh satu-satunya negara di Asia Selatan yang masuk dalam peringkat 50 dalam indeks kesenjangan gender global pada tahun 2019. Meningkatnya kesetaraan gender di Bangladesh artinya ada peningkatan dalam mencapai SDGs tujuan kesetaraan gender. Namun peningkatan tersebut tidak berlaku pada tujuan kesetaraan gender target 5.2 mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan, karena dari tahun 2016-2020 tidak terlihat adanya penurunan yang signifikan pada jumlah kekerasan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti tantangan apa yang dihadapi pemerintah Bangladesh dalam mencapai SDGs tujuan kesetaraan gender target 5.2 pada tahun 2016-2020.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang ingin dijawab penulis adalah “Apa tantangan pemerintah Bangladesh dalam mencapai SDGs tujuan lima target 5.2 pada tahun 2016-2020?”

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Bangladesh dalam mencapai SDGs khususnya tujuan kesetaraan gender target 5.2.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dalam perkembangan kajian Ilmu Hubungan Internasional terkait SDGs tujuan kesetaraan gender khususnya target 5.2.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah Bangladesh, UN Women dan lainnya, dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan

#### **1.6 Studi Pustaka**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa referensi yang relevan yang dijadikan sebagai acuan utama dalam menjawab pertanyaan terkait topik penelitian yang diangkat. Referensi tersebut yaitu:

Tinjauan pustaka pertama yaitu artikel yang ditulis oleh Fardaus Ara yang berjudul “Violence Against Women in Bangladesh: An Overview”.<sup>23</sup> Artikel ini membahas mengenai situasi kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh. Tulisan ini menjelaskan beberapa macam kekerasan yang terjadi di Bangladesh seperti, kekerasan dalam rumah tangga (kekerasan terkait mas kawin, pernikahan anak, perkosaan atau kekerasan dalam perkawinan, pelecehan verbal dan

---

<sup>23</sup> Fardaus Ara, “Violence against Women in Bangladesh: An Overview,” *Journal of Public Administration* 2, No. 1 (2020): 24–30.

penyiksaan fisik), kekerasan asam, pemerkosaan diikuti dengan kematian, aborsi paksa, pelecehan seksual, kekerasan di tempat kerja, dan perdagangan manusia.

Artikel ini juga menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah Bangladesh berkomitmen untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan dengan meratifikasi beberapa perjanjian internasional hak asasi manusia, konvensi dan rencana aksi untuk menjamin hak perempuan dalam masyarakat. Pemerintah Bangladesh juga telah membuat dan merevisi sejumlah undang-undang untuk menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan.

Artikel ini berkontribusi untuk membantu penulis dalam melihat kondisi kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Bangladesh. Artikel ini membahas mengenai upaya pemerintah dalam menghadapi kekerasan di Bangladesh. Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian penulis membahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Bangladesh dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Tinjauan pustaka kedua yaitu artikel yang ditulis oleh Md. Abu Shaheen yang berjudul “Gender-Based Violence In Bangladesh: A Critical Analysis”.<sup>24</sup> Artikel ini membahas tentang kebebasan ruang gerak perempuan yang terbatas, serta lingkungan bisnis yang tidak menguntungkan bagi perempuan di Bangladesh. Artikel karya Shaheen ini menjelaskan bahwa mengurangi pergerakan perempuan dan anak perempuan, serta ketidakhadiran perempuan di tempat kerja dapat mengakibatkan penurunan produktivitas, penurunan pendapatan dan meningkatkan angka putus sekolah di antara siswa perempuan

---

<sup>24</sup> Md. Abu Shaheen, “Gender-Based Violence In Bangladesh: A Critical Analysis,” *International Journal of Qualitative Research* 1, No. 2, <https://doi.org/10.47540/ijqr.v1i2.306>.

yang bersekolah. Akibatnya, perempuan dan anak perempuan tidak mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan termasuk tidak dapat mencari layanan yang diperlukan, termasuk layanan kesehatan fisik dan mental. Dijelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan menghambat kesenangan atas hak-hak perempuan dan kesempatan yang sama bagi perempuan.

Kontribusi yang didapatkan melalui tulisan ini yaitu pemahaman mengenai hubungan kekerasan terkait gender dengan hak-hak perempuan di Bangladesh. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada pembahasan. Tulisan ini membahas mengenai kekerasan dan pelecehan berbasis gender di Bangladesh. Penelitian penulis membahas kekerasan terhadap perempuan dan hubungannya dengan tantangan yang dihadapi pemerintah Bangladesh.

Tinjauan pustaka ketiga yaitu artikel yang ditulis oleh Subrata Banarjee yang berjudul “Identifying Factors of Sexual Violence Against Women and Protection of Their Rights in Bangladesh”.<sup>25</sup> Artikel ini mengidentifikasi faktor-faktor kekerasan seksual terhadap perempuan di Bangladesh. Salah satu faktornya yaitu budaya patriarki yang telah merendahkan nilai perempuan dan anak perempuan. Diskriminasi gender yang mengarah pada kekerasan gender tertanam kuat dalam struktur sosial Bangladesh. Kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh dalam beberapa hal diterima secara budaya.

Artikel ini juga menjelaskan hambatan perempuan untuk mengakses sistem peradilan. Korban kekerasan di Bangladesh justru menghindari proses

---

<sup>25</sup> Subrata Banarjee, “Identifying Factors of Sexual Violence against Women and Protection of Their Rights in Bangladesh,” *Aggression and Violent Behavior* 52, February (2020), <https://doi.org/10.1016/j.avb.2020.101384>.

hukum, karena korban semakin tidak dipercaya oleh pemerintah. Proses hukum di Bangladesh cukup rumit, memakan waktu, mahal dan sering membuat korban tidak ingin mengambil tindakan hukum dan menegakkan hak-hak mereka di pengadilan. Dalam banyak kasus kekerasan pada perempuan, anggota polisi tidak memihak kepada korban.

Artikel ini memberikan pemahaman kepada penulis terkait faktor kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh, serta sistem peradilan bagi perempuan yang mengalami kekerasan belum cukup baik ditangani. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasan dan kerangka teori yang digunakan. Artikel ini menggunakan kerangka teori feminis radikal, sedangkan penelitian penulis menggunakan teori *policy implementation*.

Tinjauan pustaka keempat yaitu artikel yang ditulis oleh Farhana Haque dan Stephen C. Druce yang berjudul “Gender Disparity in Bangladesh: The Study of Women’s Vulnerable Situations in Patriarchal Society and The Rise of Gender Equality According to SDGs”.<sup>26</sup> Artikel ini menjelaskan bahwa di Bangladesh perempuan masih menghadapi situasi sulit untuk menegakkan hak-hak mereka yang layak di dalam keluarga, masyarakat dan secara keseluruhan pada negara. Di setiap sektor kehidupan perempuan mendapatkan pengabaian di bawah masyarakat yang didominasi laki-laki. Perempuan diperlakukan sangat buruk pada saat di rumah dan di luar rumah yang membuat mereka rentan secara sosial.

---

<sup>26</sup> Farhana Haque, “Gender Disparity in Bangladesh: The Study of Women’s Vulnerable Situations in Patriarchal Society and The Rise of Gender Equality According to SDGs,” *Integrative Journal of Conference Proceedings* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.31031/icp.2019.01.000509>.

Dijelaskan bahwa situasi rentan tersebut akan diminimalkan melalui beberapa kemajuan besar yang diambil oleh beberapa organisasi pemerintah dan non-pemerintah di Bangladesh. Di antara agenda untuk memajukan Bangladesh, pemerintah menciptakan ruang bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam kegiatan ekonomi dan politik. Pemerintah Bangladesh menyadari pentingnya memastikan kesetaraan gender dan untuk alasan tersebut pemerintah sekarang bekerja untuk mencapai SDGs tentang kesetaraan gender dan untuk membangun pemberdayaan perempuan. Pemerintah Bangladesh telah membentuk beberapa tindakan dan kebijakan dalam delapan tahun terakhir untuk memastikan kesetaraan gender dan bekerja untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi perempuan. Salah satu keberhasilan yang telah dilakukan pemerintah yaitu, di bidang politik perempuan mendapatkan pemberdayaan melalui peningkatan kursi parlemen nasional yang kini 50 kursi dari 45 kursi sebelumnya.

Artikel ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman terkait diskriminasi yang didapatkan perempuan Bangladesh dan inisiatif yang dilakukan pemerintah Bangladesh dalam mengatasi diskriminasi tersebut. Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan. Artikel ini membahas SDGs tujuan kesetaraan gender di Bangladesh. Sedangkan penelitian penulis membahas SDGs tujuan kesetaraan gender yang berfokus pada target penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di Bangladesh.

Tinjauan pustaka terakhir yaitu artikel yang ditulis oleh Md. Mizanur Rahman yang berjudul “Achieving Sustainable Development Goals of Agenda

2030 in Bangladesh: The Crossroad of The Governance and Performance”.<sup>27</sup> Artikel ini membahas mengenai upaya pencapaian target SDGs dan menyelaraskan dengan inisiatif baru yang diambil oleh berbagai kementerian dan divisi di Bangladesh. Menurut Indeks SDGs, Bangladesh memiliki posisi yang lebih baik daripada beberapa negara Asia Selatan. Divisi MOWCA telah melakukan inisiatif sejalan dengan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Platform Aksi Beijing dan SDGs. Secara historis Bangladesh telah bekerja keras untuk memastikan kesetaraan gender. Terlihat dari peningkatan indeks kesenjangan gender global dan pemberdayaan politik, Bangladesh telah mengamankan posisi ke- 50.

Dalam artikel ini dijelaskan bahwa sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah, Bangladesh telah membuat kemajuan dalam mencapai SDGs. Bangladesh merupakan salah satu negara yang terkena dampak perubahan iklim dan negara terpadat secara global, sehingga tidak dapat memenuhi target SDGs secara keseluruhan. Masih ada beberapa target SDGs yang tidak ada kemajuan dan belum tercapai di Bangladesh.

Artikel ini berkontribusi dalam menjelaskan mengenai target SDGs yang telah dicapai Bangladesh, serta inisiatif-inisiatif yang dilakukan pemerintah Bangladesh dalam mencapai SDGs. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu terletak pada ruang lingkup pembahasan. Artikel ini membahas inisiatif yang dilakukan Bangladesh dan target SDGs yang dicapai, sedangkan penelitian penulis fokus membahas tantangan pemerintah Bangladesh dalam mencapai SDGs, khususnya tujuan kesetaraan gender target 5.2.

---

<sup>27</sup> Md Mizanur Rahman, “Achieving Sustainable Development Goals of Agenda 2030 in Bangladesh: The Crossroad of the Governance and Performance,” *Public Administration and Policy* 24, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.1108/pap-12-2020-0056>.

## 1.7 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti yaitu:

### 1.7.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi bertujuan untuk melaksanakan dan mewujudkan semua strategi dan rencana yang disusun agar menjadi kenyataan. Implementasi yang efektif membutuhkan perencanaan dan mobilisasi sumber daya yang cukup.<sup>28</sup>

Pakar pertama yang fokus pada masalah implementasi dan mempresentasikan idenya adalah Douglas R. Bunker di depan forum the American Association for the Advancement of Science pada tahun 1970. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan adalah tindakan individu dan kolektif yang dilakukan oleh pemerintah dan individu swasta (organisasi) untuk mencapai tujuan.<sup>29</sup> Menurut Grindle, implementasi kebijakan adalah proses umum tindakan administratif yang dapat diselidiki pada tingkat prosedural tertentu.<sup>30</sup>

Dalam proses implementasi tidak selalu berjalan lancar, tentunya ada tantangan yang dihadapi pelaksana implementasi. Dalam mengatasi tantangan implementasi, pemangku kepentingan harus menilai sumber penyebab tantangan dan mengembangkan strategi yang ditargetkan untuk mengatasi setiap tantangan.<sup>31</sup>

Kemampuan untuk mengatasi tantangan implementasi kebijakan merupakan

---

<sup>28</sup> Anita Bhuyan, Anne Jorgensen, and Suneeta Sharma, "Taking the Pulse of Policy: The Policy Implementation Assessment Tool," *Health Policy Initiative*, May (2010): 8.

<sup>29</sup> Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa Bagaimana," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1, <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>.

<sup>30</sup> H.Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006) 25.

<sup>31</sup> USAID, "Capacity Development Implementation Barriers," *Health Policy Project*, July (2014): 2.

kemampuan bagi pemerintah, pembuat kebijakan dan masyarakat sipil, mengatasi tantangan implementasi kebijakan membutuhkan keterampilan dan kompetensi individu dan institusi.<sup>32</sup>

Dalam mencapai target SDGs yang ambisius diperlukan mobilisasi sumber daya baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Institusi yang efektif dan tata kelola yang baik menjadi penting untuk memobilisasi sumber daya domestik. Di tingkat negara, dalam mengimplementasikan SDGs pemerintah memerlukan peran masyarakat sipil, organisasi dan sektor swasta untuk mencapai hasil yang lebih baik.<sup>33</sup> Pada konteks Bangladesh, yang mana pemerintah Bangladesh telah mengimplementasikan SDGs dalam kebijakan nasionalnya. Dalam mengimplementasi kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berhasil dijalankan oleh pemerintah Bangladesh. Ada beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah Bangladesh dalam menerapkan kebijakannya.

Dalam menganalisis implementasi SDGs di Bangladesh penulis menggunakan konsep implementasi kebijakan oleh George C. Edward III. Dalam bukunya yang berjudul “*Implementing Public Policy*”, Edward III menjelaskan implementasi kebijakan, merupakan tahapan pembuatan kebijakan antara penetapan suatu kebijakan dan akibat dari kebijakan tersebut bagi orang-orang yang dipengaruhinya.<sup>34</sup> Dalam pandangan Edward III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu:<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> USAID.

<sup>33</sup> Debapriya Bhattacharya et al., “Moving Forward With the SDGs Implementation Challenges in Developing Countries,” *Friedrich Ebert Stiftung*, May (2016): 5, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26189.69609>.

<sup>34</sup> George C. Edwards, *Implementing Public Policy* (United states: Congressional Quarterly Press, 1980).

<sup>35</sup> Edwards.

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan, yang mana mengharuskan pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, dan di mana maksud dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi;
2. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun jika pelaksana (implementor) kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikannya, maka implementasinya tidak akan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, seperti kemampuan pelaksana dan sumber daya finansial;
3. Disposisi, adalah watak dan sifat-sifat yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pelaksana memiliki karakter yang baik, maka pelaksana dapat melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif ketika pelaksana dan pembuat kebijakan memiliki sikap atau sudut pandang yang berbeda;
4. Struktur Birokrasi, struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek birokrasi adalah standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang membuat aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep implementasi kebijakan oleh Edward III akan digunakan penulis untuk melihat dan menjelaskan implementasi seperti apa yang telah pemerintah Bangladesh dalam mencapai SDGs dibawah inisiasi Rencana Lima Tahun Ke-7 yang berfokus pada SDGs tujuan kesetaraan gender target 5.2. Bangladesh telah mengintegrasikan SDGs dalam kebijakan nasionalnya. Namun pada tujuan kesetaraan gender target 5.2 tidak terlihat adanya perubahan pada permasalahan. Maka dari itu, perlu untuk dilihat implementasi SDGs tujuan kesetaraan gender target 5.2 dan tantangan pemerintah Bangladesh dalam mengimplementasikan rencana nasionalnya.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggali dan memahami makna dari banyak individu atau kelompok yang muncul dari masalah sosial.<sup>36</sup> Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak dipakai untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan fakta dan data yang didapatkan dan disertai dengan penjelasan terkait tantangan pemerintah Bangladesh dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Penulis memilih penelitian jenis ini agar mampu

---

<sup>36</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches 4th Edition*, (California: SAGE Publications, 2013) 4.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017) 147.

menjelaskan secara rinci mengenai kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Bangladesh dan tantangan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut.

### **1.8.2 Batasan penelitian**

Tujuan pembatasan dalam penelitian ini yaitu untuk memfokuskan permasalahan agar tidak melebar ke topik lainnya. Dalam penelitian ini penulis menetapkan batasan pada rentang waktu 2016-2020. Rentang waktu tersebut dipilih karena pemerintah Bangladesh mengintegrasikan SDGs dalam tujuan nasionalnya, yaitu pada Rencana Lima Tahun ke-7 dari tahun 2016-2020, sehingga penulis akan meneliti tantangan apa yang dihadapi pemerintah Bangladesh pada rentang waktu tersebut, sehingga jumlah kekerasan di Bangladesh tidak menunjukkan adanya penurunan.

### **1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis**

Unit analisis merupakan objek yang perilakunya akan dideskripsikan atau dijelaskan, biasanya disebut sebagai variabel dependen.<sup>38</sup> Dalam penelitian unit analisisnya adalah Bangladesh, sebagai negara yang menyelaraskan SDGs kedalam tujuan nasionalnya. Sementara itu unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi unit analisis, biasanya disebut variabel independen.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini unit eksplanasinya adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Bangladesh. Selanjutnya level analisis dari penelitian ini yaitu negara. Hal tersebut didorong oleh, penelitian ini berfokus dalam melihat tantangan apa yang dihadapi Bangladesh dalam mencapai SDGs tujuan kesetaraan gender.

---

<sup>38</sup> Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990) 39.

<sup>39</sup> Masoed.

#### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penulis menggunakan sumber data sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder didapatkan melalui artikel jurnal, buku, laporan, kertas kerja, dan *website* resmi yang salah satunya adalah situs web SDGs Bangladesh ([sdg.gov.bd](http://sdg.gov.bd)). Sumber artikel jurnal internasional diakses melalui beberapa *website* penyedia jurnal seperti Elsevier ([elsevier.com](http://elsevier.com)), Jstor ([jstor.org](http://jstor.org)), Sage Journals ([journals.sagepub.com](http://journals.sagepub.com)), Taylor and Francis Online ([tandfonline.com](http://tandfonline.com)) serta berbagai *website* lainnya.

#### **1.8.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan proses pencarian dan kompilasi data sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen, serta bagaimana mengatur data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit, melakukan sintesa, menyusun menjadi pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga dapat dengan mudah dipahami.<sup>40</sup> Dalam menjawab penelitian, penulis melakukan analisis data dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang terkait dengan topik yang akan dibahas, seperti upaya pemerintah Bangladesh dalam mencapai SDGs, kondisi kekerasan terhadap perempuan di Bangladesh dan lainnya. Kemudian penulis merangkum dan mencatat hal-hal yang diperlukan di Microsoft Word.

Data-data yang didapatkan penulis akan dilakukan analisis berdasarkan pada kerangka konsep yang digunakan yang menjadi alat bedah bagi penulis untuk membuat pola. Penulis akan menganalisis implementasi SDGs di

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006) 17-18.

Bangladesh khususnya tujuan kesetaraan gender target 5.2 dibawah inisiasi Rencana Lima Tahun Ke-7 Bangladesh, kemudian penulis akan menganalisis keadaan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Bangladesh. Penulis akan menggunakan konsep Implementasi Kebijakan oleh Edwards III, dalam menganalisis implementasi kebijakan Rencana Lima Tahun Ke-7 Bangladesh. Dimana, Edwards III menyatakan ada 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, jenis dan pendekatan penelitian, batasan masalah, unit analisis dan tingkat analisis, teknik pengumpulan dan teknik analisis data.

### **BAB II : Sustainable Development Goals: Pembangunan Berkelanjutan di Bangladesh**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan awal mula munculnya SDGs, serta SDGs di Bangladesh.

### **BAB III : Upaya Pemerintah Bangladesh Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Bangladesh dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan.

#### **BAB IV : Implementasi Rencana Lima Tahun Ke-7 Bangladesh**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tantangan implementasi apa yang telah dilakukan pemerintah Bangladesh dan tantangannya.

#### **BAB V : Penutup**

Dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran.

